

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa merupakan saluran diskusi publik mengenai topik tertentu yang melibatkan sumber berita, audiens, dan jurnalis. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan sebuah berita dan sudut pandang unik pada suatu tulisan (Eriyanto, 2002). Media massa memiliki jangkauan audiens yang luas dalam membentuk opini publik yang dapat memperbaharui, atau membentuk yang artinya media massa menjadi sarana konstruksi sosial yang cakupannya luas.

Media berperan sebagai alat konstruksi dan penyebaran informasi untuk membentuk opini publik. *Kraus & Davis* di karyanya yang berjudul "*The Effect of Mass Communication on Political Behaviour*" menyatakan bahwa tema komunikasi politik sudah diselidiki serta dikeluarkan secara umum dari sejak tahun 1959. Mereka memberikan informasi yang menunjukkan bahwa media juga turut serta dalam membentuk suatu kenyataan politik pada lingkup rakyat. Selain demikian, mereka turut mengungkapkan permasalahan yang terkait dengan peran komunikasi politik pada sejumlah kasus aktivitas politik praktis di proses transformasi serta penciptaan komunikasi politik masyarakat (Syobah, 2012).

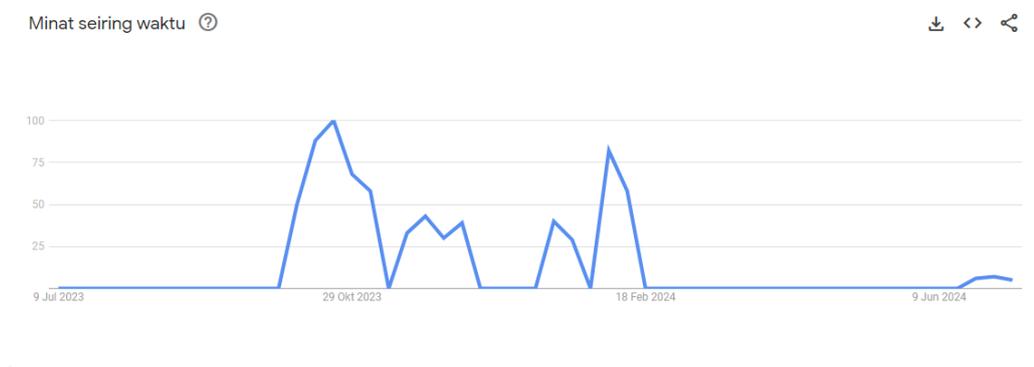
Dalam penyajian berita di media massa, tiap media tentunya memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu isu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan media yang memainkan peran penting dalam menentukan suatu isu. *Curran dan Gurevitch* (1982) dalam bukunya yang berjudul "*Culture, Society and The Media*" mengatakan keperluan pemilik media dapat memberikan pengaruh pesan yang diberikan oleh media serta menciptakan hegemoni ideologi media yang memberikan pengaruh pada audiens (Subiakto, 2014)

Dilanjut oleh pendapat dari *Shomaker dan Resse* (1991), dalam melaporkan berbagai peristiwa dan pendapat mendapatkan cakupan dari berbagai faktor yang disebut dengan *Circle of Influence*. Faktor tersebut terdiri dari lingkaran terdalam yaitu individu wartawan, awak media lain, rutinitas kerja, organisasi, faktor eksternal, dan yang paling luar adalah ideologi. Jadi, dengan demikian ideologi bisa mempengaruhi

kadar pengaruh masing-masing elemen tadi. Namun, karena dalam masyarakat juga terdapat ideologi, mungkin apa yang digambarkan oleh media berita tidaklah berdasarkan pada ideologi medianya semata (Marsun, 2022).

Selain itu, ada juga teori agenda setting yang merupakan suatu teori tentang bagaimana media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menentukan isu-isu apa saja yang dianggap penting oleh publik. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting memprioritaskan isu-isu tertentu, yang akhirnya membentuk persepsi dan perhatian publik terhadap isu-isu tersebut. Dengan begitu, media massa memainkan peran penting dalam menentukan agenda publik dengan menyoroti topik atau isu tertentu lebih sering dan lebih menonjol daripada topik atau isu lainnya (Effendy, 2001).

Agenda Setting digunakan untuk melihat bagaimana media menentukan sebuah isu yang mereka anggap penting. Dalam konteks mengenai politik dinasti Jokowi pada Pemilu 2024, agenda setting digunakan untuk melihat bagaimana media menyoroti isu ini terutama menjelang Pemilu 2024 yang mengarahkan perhatian publik pada topik tersebut dan membuatnya menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana isu ini melonjak tinggi pada bulan Oktober 2023 hingga Februari 2024 yang dilihat dari *Google Trends* sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Google Trends Mengenai Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilu 2024

Sumber: *Google Trends*

Pada media khususnya kompas.com dan cnnindonesia.com, penulis menemukan terdapat 54 berita yang ditulis oleh kompas.com dan 62 berita yang ditulis oleh cnnindonesia.com dengan total beritanya menjadi 116 berita mengenai peristiwa politik dinasti Jokowi di Pemilu 2024 pada periode oktober hingga februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kompas.com dan cnnindonesia.com mengarahkan perhatian publik dan menjadikan isu ini menjadi isu utama pada periode tersebut yang diperbincangkan menurut dari teori agenda setting tadi.

Isu mengenai politik dinasti dalam struktur Pemerintahan Indonesia terus menunjukkan keberlanjutan sebagai fenomena yang menarik. Politik dinasti merujuk pada proses pengarahannya regenerasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam upaya memperoleh atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Rezim politik dinasti mempunyai fokus utama yaitu untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan (Nurmansyah, 2016).

Menurut A.G.N Ari Dwipayana, seorang dosen ilmu politik di fisipol UGM, Mengatakan bahwa politik kekerabatan sebagai gejala dari neo patrimonialistik, yang berakar dari sistem patrimonial yang lebih dulu, yang memprioritaskan regenerasi politik berdasarkan ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, daripada sistem merit yang menilai berdasarkan prestasi (Indrawan, 2023).

Pada Agustus 2023, muncul pengajuan pada pasal 169 huruf q UU Pemilu yaitu kader PSI Dedek Prayudi, Kader Partai Garuda, Walikota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan sejumlah kepala daerah lainnya mengajukan ke MK untuk mengganti ketentuan umur calon presiden serta wakil presiden (Syaharani, 2023). Hasilnya, seseorang di bawah 40 tahun dapat maju dalam pemilu presiden asalkan pernah terpilih melalui pemilu, termasuk sebagai kepala daerah. Keputusan MK ini memunculkan kontroversi karena hakim ketua MK yang memimpin proses tersebut adalah paman Gibran, yaitu Anwar Usman, yang juga adik ipar Presiden Jokowi (Mantalean, 2023).

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap keikutsertaan Gibran sebagai bentuk dari politik dinasti, seperti survei yang dilakukan

oleh Litbang Kompas serta penghimpunan opini lewat telepon di 16-18 Oktober 2023, sejumlah 512 responden dari 34 provinsi dapat dilakukan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah 60,7% mengemukakan setuju saat diberikan pertanyaan tentang Gibran yang berhasil dipilih untuk maju ke pilpres menjadi wujud politik dinasti. Sedangkan 24,7% yang lain mengemukakan bahwa tidak sebagai wujud politik dinasti, serta 14,6% responden mengemukakan tidak tahu (Ulya, 2023).

Presiden Jokowi menanggapi isu tuduhan dinasti politik dengan menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai situasi politik yang sedang berkembang. Ia juga menjelaskan bahwa penentuan apakah dinasti politik terbentuk atau tidaknya ialah berada di tangan rakyat, bukan dirinya. Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam semua pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah, wali kota, gubernur, atau presiden, yang menetapkan hasilnya ialah warga yang memberikan suara, tidak bisa elit, tidak bisa juga partai politik. (Nuri, 2023).

Katadata memperlihatkan dalam surveynya bahwa rakyat terpisah menjadi dua mengenai dengan tindakan mereka atas isu dinasti politik. Hal ini ditunjukkan dengan survey *online* melalui formulir yang dijawab oleh responden secara mandiri yaitu 49,8% responden setuju dengan dinasti politik, sedangkan 50,1% tidak setuju. Survei ini dilangsungkan di bulan Oktober 2023 yang mengikutsertakan 1.178 responden yang terdapat di 34 Provinsi Indonesia (Pahlevi, 2023).



Gambar 1. 2 Persepsi Publik Soal Dinasti Politik

Sumber: Katadata

Dalam konteks negara demokrasi, etika mengatur tata kelola masyarakat secara implisit, membimbing kesadaran individu melalui nurani, sementara hukum bersifat

memaksa. Demokrasi yang sesuai aturan juga norma yakni saat etika warganya mempunyai kemawasan moral yang memadai juga maksimal. Namun, demokrasi sering disalah artikan sebagai kebebasan mutlak, mendorong perilaku yang sewenang-wenang. Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat tidak boleh mengabaikan prinsip etika. Dalam berpolitik, etika dan moral sering diabaikan, padahal kebebasan demokrasi memerlukan tanggung jawab dan saling menghargai antar pihak. Disiplin moral dalam aktivitas politik dan berpendapat dengan etika sangat penting. Masyarakat mengharapkan politisi yang memiliki moralitas tinggi, jujur, sopan, dan mampu menjalankan amanah (Zulkarnain, 2020)

Pada penelitian ini, peneliti memilih topik mengenai politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi karena menjadi suatu isu yang kontroversial dan aktual terutama menjelang pemilu 2024. Hal ini diperkuat oleh tulisan dari Direktur PolMark Research Center Eep Saefulloh Fatah yang mengatakan bahwa keturunan dinasti politik Jokowi ini menyaingi turunan dinasti politik yang telah ada sebelum-sebelumnya. Hal ini terjadi karena trah dinasti politik dibentuk dengan cara yang “tidak etis”, seperti pelanggaran etika berat yang terjadi karena memanfaatkan dimensi kekeluargaan yaitu Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang berstatus sebagai paman, memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka (Adji, 2023).

Media yang diambil dalam penyajian berita tersebut adalah Kompas.com serta CNNIndonesia.com. dasar dari penentuan media itu yakni dua-duanya ialah media pemberitaan yang paling diminati menurut survei dari *Databoks*, dalam surveinya, media Kompas.com menduduki strata tertinggi yaitu 69% dan CNN.com menduduki posisi dua yaitu 68% dari 2.012 responden di Indonesia.

Merek Media yang Paling Dipercaya Responden (2023) databoks

No.	Nama Data	Nilai / %
1	Kompas	69
2	CNN	68
3	TVRI	66
4	SCTV (Liputan6)	64
5	Detik.com	63
6	Tempo	60
7	TVOne	60
8	Berita televisi lokal	57
9	Tribunnews	55
10	Jawa Pos	54

Gambar 1. 3 Merek Media Yang Paling Dipercaya Responden Tahun 2023

Sumber: Databoks

Melihat bagaimana dua media besar seperti kompas.com dan cnnindonesia.com membentuk berita mengenai isu politik dinasti Jokowi dalam pemilu 2024 memberikan pertanyaan tentang bagaimana isu-isu tersebut dibingkai untuk publik.

Untuk mengetahui perbedaan model pemberitaan dari kedua portal berita *online* tersebut dalam memberitakan fenomena politik dinasti, penulis memakai metode analisis *framing*. Framing media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu dan peristiwa, contohnya dinasti politik. Bagaimana media membingkai berita tentang Gibran Rakabuming dan peran Jokowi dalam politik Indonesia tidak hanya mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika politik ke depan. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana media massa khususnya kompas.com dan cnnindonesia.com membingkai isu dinasti politik Jokowi pada pemilu 2024 dan dampaknya terhadap opini publik.

Adapun model penelitian yang digunakan penulis yaitu model *Murray Edelman* yang mengkategorikan framing ke dalam tiga aspek yaitu kategorisasi dan rubrikasi, dan kategorisasi ideologi. Selain itu, *Murray* menjelaskan tentang *framing* yaitu sesuatu yang kita mengerti terkait dunia bergantung kepada seperti apa kita mengkotakkan, mengkonstruksi, serta memberikan tafsir realitas. Realitas yang sesuai

dapat memperoleh “realitas” yang tidak sama saat di bingkai serta dikonstruksi melalui metode yang tidak sama (Eriyanto, 2002).

Dalam cakupan pencarian topik penelitian dari politik dinasti oleh peneliti, meskipun banyak penelitian yang telah meneliti mengenai *framing* media mengenai praktik politik dinasti dalam tingkatan lokal, masih sedikit penelitian terdahulu yang membahas mengenai *framing* media praktik politik dinasti yang dilakukan secara nasional. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian terkait *framing* media politik dinasti yang dilakukan secara nasional dalam pemilu 2024 oleh Jokowi. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana media kompas.com dan cnnindonesia.com membingkai berita tentang politik dinasti Jokowi pada pemilu 2024 dalam perspektif teori Murray Edelman.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah dideskripsikan peneliti, dengan demikian ada sejumlah rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis:

1. Bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh media cnnindonesia.com dan kompas.com terhadap fenomena politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilu 2024?
2. Bagaimana kategorisasi yang ditampilkan oleh portal berita online Kompas.com & CNNIndonesia.com terhadap fenomena politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilu 2024?
3. Bagaimana portal berita Kompas.com & CNNIndonesia.com membentuk rubrikasi mengenai isu politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilu 2024?
4. Bagaimana portal berita Kompas.com & CNNIndonesia.com membentuk kategorisasi ideologi dalam isu politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh portal berita Kompas.com dan CNNIndonesia.com terhadap fenomena dinasti politik Presiden Jokowi pada pemilu 2024.
2. Penelitian ini disusun guna mengidentifikasi serta menjelaskan Kategorisasi dan yang ditampilkan oleh portal berita online Kompas.com

dan CNNIndonesia.com terhadap fenomena politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilu 2024.

3. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan rubrikasi mengenai bagaimana portal berita online Kompas.com dan CNNIndonesia.com terhadap fenomena dinasti politik Presiden Jokowi pada pemilu 2024.
4. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kategorisasi ideologi terhadap fenomena dinasti politik Presiden Jokowi pada pemilu 2024 pada portal berita online Kompas.com dan CNNIndonesia.com.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Harapan penulis dari hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dan membantu memperkaya terkait studi media yang menggunakan analisis framing di ranah komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran media dalam membentuk narasi politik dan pentingnya netralitas dan objektivitas dalam pemberitaan media.
2. Dapat menjadi wadah ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait bagaimana media menyampaikan fakta atau peristiwa menjadi sebuah berita.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilangsungkan dimulai di bulan Januari 2024 dan selesai hingga bab 5 pada bulan Juli 2024. Secara lengkap dan detail tahapan dan waktu observasi dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Waktu Dan Periode Penelitian

Kegiatan	2024			
	Jan - Mar	April - Mei	Juni - Juli	Agustus

Menentukan Topik Penelitian				
Pra Penelitian				
Penyusunan Proposal				
Seminar Proposal				
Pengumpulan Data				
Penyusunan Skripsi				
Pendaftaran Sidang				
Sidang Skripsi				